

PENGARUH EFEKTIVITAS E-KATALOG, INFORMASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA TERHADAP PELAYANAN PENGADAAN KONTRUKSI DI KOTA TANGERANG

Bayu Yuniarto¹, Dafyar Eliadi H², Nurjanah Yusuf³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Correspondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Latar belakang masalah pada penelitian ini berkaitan dengan masalah administrasi publik yaitu mengenai efektivitas e-katalog, informasi lelang, penetapan harga dan pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang, sehingga masalahnya dirumuskan untuk mengetahui pengaruh efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang. Pada penelitian ini akan diuji teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode penelitian secara kuantitatif. Penelitian dilakukan kepada responden penelitian yang berasal dari penyedia jasa konstruksi di Kota Tangerang dengan menggunakan sampel jenuh, Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisa menggunakan teknik analisa kuantitatif yaitu pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik dan analisis data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS IBM 26. Analisis pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan koefisien determinasi untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan efektivitas e-katalog terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang. Informasi selanjutnya bahwa terdapat pengaruh signifikan informasi terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang, terdapat pengaruh signifikan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang, terdapat pengaruh signifikan efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang, meskipun secara statistik variabel efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga memiliki pengaruh yang signifikan dengan pelayanan pengadaan konstruksi, dalam praktiknya keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan teknis, regulasi yang adaptif, serta sosialisasi yang memadai bagi para pelaku usaha konstruksi.

Kata kunci : Efektivitas E-katalog, Informasi Lelang, Penetapan Harga dan Pelayanan Pengadaan Konstruksi.

Abstract

The background of this study concerns a public administration issue regarding the effectiveness of the e-catalog, tender information, pricing, and construction procurement services in Tangerang City. Consequently, the research problem is formulated to determine the influence of e-catalog effectiveness, tender information, and pricing on construction procurement services in Tangerang City. This study tests theories related to the research variables using a quantitative research method. Data were collected from construction service providers in Tangerang City using a saturated sampling technique. The collected data were analyzed using quantitative techniques –

specifically hypothesis testing via statistical analysis – with the aid of IBM SPSS 26 software. Hypothesis testing was conducted using regression analysis and the coefficient of determination to address the formulated problem and verify the research hypotheses. The analysis results indicate that there is no significant influence of e-catalog effectiveness on construction procurement services in Tangerang City. However, the results show a significant influence of tender information and pricing on construction procurement services in Tangerang City. Furthermore, there is a significant combined influence of e-catalog effectiveness, tender information, and pricing on construction procurement services in Tangerang City. Although the variables of e-catalog effectiveness, tender information, and pricing statistically demonstrate a significant influence on construction procurement services, successful implementation in practice remains dependent on technical readiness, adaptive regulations, and adequate outreach to construction business stakeholders.

Keywords: *E-catalog Effectiveness, Tender Information, Pricing, and Construction Procurement Services.*

A. Pendahuluan

Proses pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aktivitas krusial dalam setiap organisasi atau lembaga pemerintah. Pengadaan yang dilakukan secara efisien dan transparan akan mendukung kelancaran operasional serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk dalam sektor konstruksi. Di Indonesia, sistem pengadaan barang dan jasa publik telah mengalami sejumlah perubahan dan inovasi, di antaranya adalah penerapan e-katalog. Sistem katalog elektronik (E-katalog) mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi rantai birokrasi, memudahkan proses, dan mengubah mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sudah ada. Kebijakan baru ini bertujuan untuk mendukung proses pengadaan pemerintah dalam era Internet of Things (IoT) dan menyesuaikannya dengan kemajuan teknologi. E-katalog meliputi barang, pekerjaan konstruksi, dan/atau jasa lainnya. E-katalog ini terdiri dari katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. Selain itu, e-Purchasing adalah proses pembelian barang atau jasa melalui sistem e-katalog yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuan dari e-Purchasing sendiri adalah untuk memungkinkan semua Unit Kerja Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem e-katalog.

E-katalog merupakan bagian dari e-government yang mempunyai tujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat tanpa intervensi dan mempermudah layanan tanpa antrian yang lebih mudah diakses. Teknologi komunikasi informasi memudahkan orang untuk mendapatkan informasi, yang mengurangi kemungkinan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintahan. Paket pekerjaan jasa konstruksi yang telah ditawarkan oleh pemerintah Kota Tangerang pada e-katalog lokal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Landasan hukum yang kokoh diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi hak dan kebutuhan pelayanan umum yang layak. Landasan hukum ini harus menjamin kepastian hukum dan melindungi semua warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan iklim pengadaan barang/jasa yang kondusif. Menurut penelitian (Janson & Safuan, 2022) Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka inginkan dengan menggunakan

prosedur tertentu untuk mencapai kesepakatan tentang harga, waktu, dan faktor lainnya. Agar tujuan pengadaan barang dan jasa benar-benar terwujud, pihak pengguna dan penyedia harus selalu bergantung pada filosofi pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada etika dan standar yang berlaku. Dalam pengadaan barang atau jasa, ada dua pihak yang terlibat: pihak pengguna dan pihak penyedia jasa. Pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk menyediakan atau menyelesaikan tugas tertentu. Pengguna dapat berupa individu atau perusahaan. Menurut penelitian (Faniyah et al., 2024) pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dikeluhkan oleh para pengusaha jasa konstruksi. Sistem e-katalog memang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 (tiga) prasyarat pelaksanaan dari pemerintah yaitu syarat hukum pelaksanaan, syarat tingkat kemampuan teknologi dan syarat tingkat kemampuan sumber daya manusia. Selain itu penggunaan sistem e-katalog menimbulkan masalah persaingan bisnis di antara penyedia jasa konstruksi. Permasalahan yang terjadi karena adanya anggapan bahwa seolah-olah pekerjaan jasa konstruksi dimonopoli oleh satu perusahaan, sehingga Timbul anggapan bahwa sistem e-katalog yang bersifat tertutup memungkinkan adanya monopoli. Berdasarkan hasil observasi awal juga ditemui permasalahan terkait dengan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog transaksi maupun pemilihan barang jasa konstruksi. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan pengguna jasa tentang menilai ketersediaan paket kegiatan dalam e-katalog serta kurangnya sosialisasi penyedia barang dan jasa. Akibatnya, masih ada penyedia jasa konstruksi yang memberikan komentar kurang baik tentang layanan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Tujuan awal pengadaan melalui e-katalog untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang jasa, e-katalog dapat melindungi keamanan pejabat pengadaan dan pembuat komitmen. Sehingga perlu dikaji terkait dengan efektivitas e-katalog dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa konstruksi di Kota Tangerang dan dilihat faktor lainnya yang bisa memberikan pengaruhnya terhadap pelayanan jasa konstruksi bagi para penyedia jasa konstruksi.

Efektivitas berarti menggunakan sumber aktivitas untuk mendapatkan hasil. Ini dikenal sebagai teori efektivitas, yang berarti menggunakan semua aktivitas untuk mendapatkan hasil sesuai dengan aktivitas penggunaan. Dengan kata lain, mendapatkan hasil maksimal sesuai penggunaannya (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, kesesuaian antara individu yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju dikenal sebagai efektifitas. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hal hanya dapat dianggap efektif jika sesuai dengan tujuan, tercapainya semua tugas penting, tepat waktu, dan partisipasi aktif dari semua orang. Sistem atau platform digital yang dikenal sebagai "Platform E-katalog" memamerkan dan mengelola katalog produk atau layanan secara elektronik. Platform ini memungkinkan bisnis atau penyedia layanan untuk memposting detail produk atau layanan mereka secara online sehingga calon penyedia jasa konstruksi dapat mengaksesnya. Platform e-katalog memberikan penyedia akses ke pasar yang lebih besar dan lebih menjanjikan serta memfasilitasi perbandingan belanja produk dan layanan melalui internet. Rencana yang dibuat dan hasil yang dihasilkan dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat efektivitas. Namun, pekerjaan tidak efektif jika hasil dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga tujuan tidak tercapai. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif sebuah program adalah dengan melakukan penilaian tingkat kesesuaiannya dengan tujuan dan outputnya. Efektivitas program e-katalog pada penelitian ini disintesis sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan e-katalog memberikan kontribusi terhadap pengadaan barang dan jasa konstruksi di Kota Tangerang.

Pengujian tingkat kebenaran informasi adalah hal yang penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerimaan informasi. Beberapa hal yang juga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam penerimaan informasi adalah pemberian makna pada saat komunikasi menerima informasi dan kesadaran dari komunikasi bahwa informasi yang diterima haruslah informasi yang berguna atau bermanfaat (Nasrullah, 2017). Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang disusun atau diubah sehingga memiliki arti bagi orang yang menerimanya (Irviani, 2017). Informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan. (Suryanto, 2015) menyebutkan terdapat komponen dalam penyebaran informasi yang saling berkaitan yang menentukan efektif atau tidaknya kegiatan penyebaran informasi. Adapun komponen tersebut sebagai berikut: a). Pengirim pesan: Pengirim pesan (komunikator) adalah orang yang gagasan atau pemikirannya akan disampaikan melalui media yang dipilihnya; b). Penyandian atau encoding: Komponen penyandian merupakan proses pengkodean gagasan ke dalam simbol tertentu baik secara verbal maupun non verbal. Penyampaian kode akan dibantu oleh media atau saluran komunikasi untuk disampaikan kepada lawan komunikasi; c). Penerima informasi (Komunikasi): penerima informasi (komunikasi). Penerima informasi akan menyandikan kembali informasi yang dikirim oleh komunikator agar komunikasi yang dikirim dapat dipahami oleh komunikasi. Proses penyandian kembali ini akan berlangsung sesuai kemampuan komunikator, sehingga prosesnya dapat berjalan secara cepat maupun lambat.

Penetapan harga barang adalah faktor yang tidak kalah penting dalam pengadaan, terutama dalam sektor konstruksi yang memerlukan kalkulasi biaya yang tepat agar proyek dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Harga yang tepat tidak hanya memastikan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga berkontribusi pada pemilihan penyedia barang dan jasa yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Penetapan harga barang yang transparan dan sesuai dengan standar pasar akan mempengaruhi keputusan penyedia barang dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan, serta berdampak pada hasil akhir dari pengadaan tersebut. HPS adalah harga yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan artian penetapan harga maksimal yang menjadi acuan penyedia dalam membeli suatu barang yang memenuhi spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan spesifikasinya tidak boleh dibawah ketentuan yang sudah ditetapkan. HPS dihitung berdasarkan harga satuan dipasar, bukan harga grosir, bukan juga harga pembelian dalam jumlah besar. Terdapat perbedaan penetapan HPS pengadaan barang dan jasa konstruksi di Kota Tangerang. Menurut (Yudha, 2023) dalam konsep administrasi, selama keputusan penetapan HPS tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan maka diperbolehkan, tetapi apabila merugikan maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka dapat disimpulkan didalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan. Penetapan harga yang dimaksud dalam konteks penelitian ini yaitu penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. Dengan demikian dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang paling krusial bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS yang ditetapkan terlalu rendah, akan semakin

besar kemungkinan pengadaan mengalami kegagalan karena semua penawaran penyedia berada di atas HPS atau bahkan tidak ada penyedia barang dan jasa yang berminat untuk mengikuti lelang pengadaan tersebut karena dianggap harga yang ditawarkan tidak atau hanya sedikit memberikan keuntungan bagi mereka. Kota Tangerang, sebagai salah satu kota yang sedang berkembang pesat dalam bidang infrastruktur, menghadapi tantangan dalam mewujudkan proses pengadaan yang efisien dan akuntabel. Meskipun telah ada kebijakan untuk menerapkan sistem *e-katalog*, efektivitas implementasi sistem ini serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang masih perlu dianalisis.

Pelayanan sangat penting untuk membuat pemohon layanan tetap nyaman dan puas dengan layanan yang diberikan oleh organisasi. Jika organisasi memiliki pelayanan yang baik, pengguna layanan tidak akan menjauh dan menggunakan layanan organisasi lain. Menurut Kotler yang dikutip didalam (Ruslan, 2019) pelayanan adalah setiap tindakan atau tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut (Supriyono, 2018) mengatakan Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan dapat dilayani dengan baik, sehingga meninggalkan kesan yang luar biasa. LPSE media pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya, akan tetapi juga pelayanan interaksi atau aktivitas antara manusia dan mesin untuk memberikan suatu kepuasan kepada yang menerima layanan (Poltak, 2019). LPSE sebagai media pelayanan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah menurut (Poltak, 2019) pada dasarnya tujuannya harus bisa memenuhi kepuasan Masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai lelang dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan penyedia barang dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kualitas hasil pengadaan.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Bagaimana pengaruh efektivitas e-katalog terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang?
2. Bagaimana pengaruh informasi lelang terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang?
3. Bagaimana pengaruh penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang?
4. Bagaimana pengaruh efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Populasi pada penelitian ini yaitu 99 orang yang terdiri dari penyedia barang dan jasa konstruksi sebanyak 75 orang dan 24 orang pegawai Bidang Bangunan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang. Dan sampel yang diambil yaitu 75 orang penyedia jasa konstruksi di Kota Tangerang

Sedangkan Lokasi dan waktu penelitiannya di Kota Tangerang. Selama 6 (enam) bulan, dari bulan Maret sd Agustus 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

- a. Pengaruh Efektivitas E-katalog terhadap Pelayanan Pengadaan Kontruksi. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas e-katalog memiliki koefisien regresi sebesar 0,058 dengan nilai signifikansi $0,329 > 0,05$.
- b. Pengaruh Informasi Lelang terhadap Pelayanan Pengadaan Konstruksi untuk informasi lelang adalah 0,471 dengan nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pengadaan konstruksi dengan demikian hipotesis kedua (H2) dapat diterima kebenarannya yaitu terdapat pengaruh signifikan informasi terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang .
- c. Pengaruh Penetapan Harga terhadap Pelayanan Pengadaan Konstruksi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel penetapan harga adalah 0,414 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan pengadaan konstruksi, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya yaitu terdapat pengaruh signifikan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang.
- d. Pengaruh Efektivitas e-katalog, Informasi Lelang, dan Penetapan Harga terhadap Pelayanan Pengadaan Konstruksi menunjukkan bahwa efektivitas e-katalog, informasi lelang, dan penetapan harga secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pengadaan konstruksi dengan nilai F sebesar 123,319 dan signifikansi 0,000, dengan demikian hipotesis keempat (H4) terdapat pengaruh signifikan efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang.

2. Pembahasan

- a. Pengaruh Efektivitas E-katalog terhadap Pelayanan Pengadaan Kontruksi, tidak terdapat pengaruh signifikan efektivitas e-katalog terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem e-katalog telah diterapkan, faktor lain seperti pemahaman penyedia jasa, aksesibilitas sistem, dan regulasi teknis lebih berperan dalam menentukan kualitas pelayanan pengadaan konstruksi.
- b. Semakin transparan dan mudah diaksesnya informasi lelang, semakin baik pula kualitas pelayanan pengadaan konstruksi yang dirasakan oleh penyedia jasa. Selain itu Informasi lelang yang jelas dan akurat dapat meningkatkan partisipasi penyedia jasa dalam proses pengadaan. Ketika informasi mengenai lelang mudah diakses, penyedia jasa dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan lebih baik, sehingga mempercepat proses administrasi dan seleksi. Studi

yang dilakukan oleh (Handoko, A., 2024) menemukan bahwa penyedia jasa yang memiliki akses terhadap informasi lelang yang real-time dan terstruktur lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi lelang yang efektif dapat meningkatkan persaingan yang sehat di antara penyedia jasa konstruksi.

- c. Kejelasan dan ketepatan dalam penetapan harga dapat meningkatkan transparansi serta kepercayaan penyedia jasa terhadap sistem pengadaan konstruksi. Studi oleh (Mulyono, R., & Setiawan, 2024) menegaskan bahwa keterbukaan dalam menetapkan harga konstruksi berkontribusi langsung pada efisiensi proyek dan peningkatan partisipasi penyedia jasa. Penetapan harga yang realistis dan berdasarkan data pasar yang akurat menciptakan lingkungan persaingan yang lebih sehat. Penelitian dari (Kartika, 2023) mengungkapkan bahwa adanya fleksibilitas dalam sistem penetapan harga dapat meningkatkan daya tarik bagi penyedia jasa baru. Kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran agar mampu meraih keberhasilan dalam belajar dan mengajar (Putri, 2024).
- d. Efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang bersama-sama berperan dalam menentukan kualitas pelayanan pengadaan. (Santoso, 2023) menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan pengadaan konstruksi adalah transparansi informasi, efisiensi sistem e-katalog, dan kejelasan mekanisme penetapan harga. Kombinasi dari ketiga faktor ini menghasilkan proses pengadaan yang lebih terstruktur dan dapat meningkatkan partisipasi penyedia jasa konstruksi.

D. Kesimpulan

1. Efektivitas e-katalog memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,058 dengan nilai signifikansi $0,329 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pelayanan pengadaan konstruksi tidak signifikan, dengan demikian hipotesis pertama (H1) tidak terbukti kebenarannya yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan efektivitas e-katalog terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang.
2. Informasi lelang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,471 dengan nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pengadaan konstruksi, dengan demikian hipotesis kedua (H2) terbukti kebenarannya yaitu terdapat pengaruh signifikan informasi terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang.
3. Penetapan harga memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,414 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan pengadaan konstruksi, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) terbukti kebenarannya yaitu terdapat pengaruh signifikan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang.
4. Efektivitas e-katalog, informasi lelang, dan penetapan harga secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pengadaan konstruksi

dengan nilai F sebesar 123,319 dan signifikansi 0,000, dengan demikian hipotesis keempat (H4) terbukti kebenarannya yaitu terdapat pengaruh signifikan efektivitas e-katalog, informasi lelang dan penetapan harga terhadap pelayanan pengadaan konstruksi di Kota Tangerang..

Referensi

Buku

- Budiwanti, E. (2021). *Administrasi Publik: Teori dan Praktek dalam Pemerintahan*. Gramedia.
- Chandrarini, G. (2019). *Metode Riset Akuntansi: Metode Riset Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Ginting, P. (2021). *Sistem Informasi dalam Administrasi Publik: Teori dan Implementasi*. Andi.
- H.A.S, M. (2016). *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia (Cetakan ke)*. Bumi Aksara.
- Irviani, A. dan. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Andi Offset.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ke 3 (Kedua)*. UPP STIM YKPN.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial (Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Noor, J. (2019). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Poltak, S. L. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Bumi Aksara.
- Ruslan, R. (2019). *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Steers, M. R. (2017). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian (Best Selle)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif Kuantitatif (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyono. (2018). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis*. Alfabeta.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pustaka Setia.
- Suwito, S. (2023). *Prinsip-Prinsip Administrasi Publik yang Efektif*. UB Press

Jurnal

- Arifin, K., Daga, R., & Anshar, M. A. (2023). Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 193–205. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v2i2.165>
- Arifin, Z., Sediati, D. S. R., & Soegianto, S. (2020). Peningkatan Kemampuan Administrasi Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bidang Jasa Konstruksi. *Journal of Dedicators Community*, 4(2), 141–151. <https://doi.org/10.34001/jdc.v4i2.1097>
- Ariza, D. (2024). E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 20–29. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i1.649>
- Faniyah, I., Prtama, B. P., & Yendri, N. (2024). Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. 8(2), 417–426.

- Handoko, A. (2024). Akses Informasi Lelang dan Partisipasi Penyedia Jasa. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 33–47.
- Janson Pangaribuan, Safuan, M. (2022). Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN:, 7(2), 2624–2633. <https://doi.org/10.1080/0965079940020112>
- Kartika, T. (2023). Fleksibilitas Harga dalam Sistem Pengadaan Konstruksi. *Jurnal Infrastruktur Publik*, 11(1), 78–92.
- Mulyono, R., & Setiawan, H. (2024). Dampak Transparansi Penetapan Harga terhadap Efisiensi Proyek. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(2), 130–145.
- Nugroho, R. (2023). Hambatan dalam Implementasi Informasi Lelang: Perspektif Penyedia Jasa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(2), 72–88.
- Nurdin, H. (2024). Keberhasilan Implementasi E-Katalog di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 34–50.
- Pradana, W. (2024). Kendala Teknis dalam Implementasi Sistem Pengadaan Digital. *Jurnal Manajemen Infrastruktur*, 13(1), 60–75.
- Prasetyo, T. (2024). Peran Transparansi Lelang dalam Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 100–115.
- Rachman, D., & Dewi, F. (2023). Efisiensi Administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(3), 130–145.
- Riyanto, W., & Yodha, F. P. (2024). Strategi Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi di Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 3(1), 37–45. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/49>
- Rizki, A., Handayani, D. I., & ... (2023). Analysis of Self-Estimated Pricing (HPS) in the Procurement Department Units 1&2 PT. *PJB UP Paiton. Prozima*, 7(1), 59–72.
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.36080/jak.v12i1.2101>
- Santoso, B., W. (2023). Kendala Penyedia Jasa dalam Mengakses Informasi Lelang. *Jurnal Infrastruktur Dan Pembangunan*, 14(2), 56–70.
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.798>
- Valdoni Sandi, P., Sintia Empak, F., & Janto, V. (2023). Analisis Kesesuaian Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah di Surabaya. *Jurnal Perencanaan Dan Rekayasa Sipil*, 6(2), 72–78. <https://doi.org/10.25139/jprs.v6i2.5933>
- Wijayanti, A., & Hidayat, T. (2023). Analisis Kegagalan Pengadaan Konstruksi: Studi Kasus di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 45–60.
- Wijayanto. (2024). Analisis Ketidakseimbangan Harga dan Kualitas dalam Proses Pengadaan Konstruksi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 90–105.

Yudha, F. K. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Merugikan Negara. Universitas Batanghari Jambi.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).